

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Gina Setyanintyas, Maesaroh, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the concept of collaborative governance in the development of the Bledug Kuwu tourist attraction in Grobogan Regency. In this context, tourism management is faced with challenges such as less than optimal coordination between stakeholders, budget limitations and inadequate infrastructure. A collaborative governance approach involving cooperation between government, the private sector and local communities is expected to maximize tourism potential and improve regional welfare. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews and documentation. The research results show that although collaboration between stakeholders has had a positive impact, several challenges such as lack of understanding of the concept of collaboration, sectoral egos, and lack of government attention still hinder the sustainability of tourism development. This research suggests the need to increase understanding, better coordination, and strengthen regulations to support successful collaboration in sustainable tourism development.

Keywords: *Collaborative Governance, Tourism Development*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan. Dalam konteks ini, pengelolaan pariwisata dihadapkan pada tantangan seperti koordinasi yang kurang optimal antara pemangku kepentingan, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang belum memadai. Pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal diharapkan dapat memaksimalkan potensi wisata dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antar pemangku kepentingan telah memberikan dampak positif, beberapa tantangan seperti ketidakpahaman tentang konsep kolaborasi, ego sektoral, dan kurangnya perhatian pemerintah masih menghambat keberlanjutan pengembangan wisata. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pemahaman, koordinasi yang lebih baik, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengembangan Wisata

Pendahuluan

Penelitian ini berfokus pada pengembangan pariwisata melalui pendekatan *collaborative governance* di Kabupaten Grobogan, dengan fokus utama pada objek wisata Bledug Kuwu. Pemerintah daerah Grobogan dihadapkan pada tantangan dalam mengoptimalkan potensi objek wisata yang ada, meskipun sektor pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan pelestarian alam. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memainkan peran yang lebih aktif dan proaktif dalam mengelola destinasi wisata, baik melalui kebijakan, fasilitas, maupun kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Konsep *collaborative governance* merupakan wadah di mana sektor publik dan swasta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti yang dijelaskan oleh Holzer et al. (dalam Anriani, 2021). Kolaborasi tidak hanya untuk memastikan kelancaran pemerintahan tetapi juga untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah yang ada di sektor pariwisata, seperti koordinasi kurang, keterbatasan sumber daya, dan masalah infrastruktur yang menghambat aksesibilitas.

Pada sisi lain, meskipun Kabupaten Grobogan memiliki beberapa objek wisata menarik, termasuk Bledug Kuwu yang kini menjadi destinasi unggulan, pengelolaan yang belum optimal menyebabkan penurunan jumlah pengunjung selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan, objek wisata Bledug Kuwu mengalami penurunan jumlah pengunjung akibat pandemi COVID-19, namun mulai menunjukkan pemulihan sejak tahun 2022. Fenomena ini menggambarkan pentingnya implementasi *collaborative governance* untuk mengatasi permasalahan dan memaksimalkan potensi wisata.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi *collaborative governance* di sektor pariwisata Kabupaten Grobogan, khususnya di Bledug Kuwu. Beberapa aspek yang akan diteliti mencakup koordinasi antar pemangku kepentingan, alokasi sumber daya, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pengembangan objek wisata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Grobogan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *collaborative governance* dapat meningkatkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, memperbaiki distribusi sumber daya, serta menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008; Bryson et al., 2015). Namun, implementasi yang kurang optimal dalam konteks Kabupaten Grobogan, terutama dalam pengelolaan wisata Bledug Kuwu, menunjukkan adanya masalah koordinasi, keterbatasan anggaran, dan kelembagaan yang belum maksimal.

Administrasi publik adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, administrasi publik mencakup kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Seperti yang dikatakan oleh The Liang Gie (dalam Syafiie, 2000:14), administrasi adalah "serangkaian pengaturan terhadap pekerjaan utama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu."

Paradigma administrasi publik, khususnya dalam *New Public Service* (NPS), menekankan pada pelayanan publik yang berkualitas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan

birokrasi. NPS berfokus pada partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar sektor dalam pengelolaan kebijakan publik (Amitai Etzioni dan Gerald Caiden). Salah satu pendekatan dalam paradigma ini adalah *collaborative governance*, yang merujuk pada kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kompleks dan mencapai tujuan bersama (Choi & Robertson, 2018).

Collaborative governance diterapkan dalam pengelolaan sektor pariwisata untuk menghadapi tantangan yang semakin rumit, seperti pengembangan objek wisata yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. DeSeve (dalam Sudarmo, 2018:114) mengidentifikasi beberapa kriteria keberhasilan dalam kolaborasi, antara lain: komitmen terhadap tujuan bersama, saling percaya di antara para pelaku, serta pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab. Namun, tantangan yang sering ditemukan adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pengembangan wisata, terbatasnya kepercayaan antar pelaku, serta kurangnya sosialisasi dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan untuk pengembangan wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan. Permasalahan yang

muncul, seperti kurangnya komitmen bersama, terbatasnya akses kekuasaan, dan kurangnya infrastruktur, menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih baik dalam kolaborasi ini. Doberstain (2016) menambahkan bahwa kolaborasi yang melibatkan pegawai negeri dan aktor masyarakat sipil memungkinkan terciptanya keputusan yang berbeda dari sistem birokrasi tradisional yang tidak melibatkan masyarakat sipil.

Pengembangan pariwisata di Grobogan, yang merupakan bagian dari paradigma NPS, memerlukan pendekatan yang mengutamakan kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan destinasi yang berkelanjutan dan menarik. Mengacu pada teori ekonomi, sektor pariwisata perlu beralih dari fokus pada permintaan menuju penawaran, dengan memperhatikan aspek lingkungan, infrastruktur, dan nilai budaya yang ada (Murphy dalam Tjahjadi, 2018). Sehingga, kolaborasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata Bledug Kuwu dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi tantangan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan sektor pariwisata, agar dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kerjasama dalam pengembangan wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dengan kata-kata atau gambar, bukan angka (Bogdan & Taylor dalam Kristanto, 2018: 13).

Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang hanya dapat diukur secara tidak langsung, seperti kata-kata dan perilaku (Sugiyono, 2018). Data diperoleh melalui triangulasi yang mencakup tiga teknik pengumpulan data: observasi langsung terhadap kondisi sarana wisata (Sugiyono, 2018: 229), wawancara semiterstruktur dengan pihak terkait (Sugiyono, 2018:467), serta dokumentasi yang diperoleh dari arsip dan laporan (Sugiyono, 2018:329; Mardawani, 2020:52).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Sirajuddin Saleh, 2018:74). Untuk memastikan kualitas data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu pengecekan data

dari berbagai sumber yang berbeda untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Afiyanti & Rachmawati, 2014; Sugiyono, 2018). Selain itu, member check dilakukan dengan meminta kesepakatan dari sumber data yang terlibat untuk memastikan keabsahan temuan (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Collaborative Governance di Wisata Bledug Kuwu

1. Kondisi Awal

Kondisi Awal menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata menghadapi tantangan dalam koordinasi antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah kabupaten, pengelola wisata, dan masyarakat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang konsep collaborative governance, dengan beberapa pihak lebih berfokus pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat desa. Hal ini menyebabkan miscommunication dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang konsep ini untuk meningkatkan pemahaman bersama.

Pengetahuan Pemangku Kepentingan juga menjadi masalah utama, karena beberapa pihak, seperti

pengelola wisata dan investor, belum sepenuhnya memahami pentingnya kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara aspek profit dan kelestarian lingkungan menjadi kendala utama dalam implementasi collaborative governance. Koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan yang belum optimal menambah tantangan, yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih program dan keraguan dalam komitmen bersama.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan desa wisata yang efektif di Kabupaten Grobogan memerlukan pendekatan kolaboratif yang komprehensif, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, memperbaiki koordinasi antar pihak, serta memastikan adanya pemahaman yang mendalam tentang peran dan kontribusi semua pihak dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan

2. Desain Kelembagaan

Langkah-langkah prosedural dalam penerapan collaborative governance untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan meliputi identifikasi pemangku kepentingan, pembangunan komitmen bersama, merumuskan mekanisme

koordinasi, penyusunan rencana aksi bersama, dan evaluasi rutin. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keragaman kepentingan pemangku kepentingan, kesulitan dalam menyatukan visi bersama, dan hambatan dalam koordinasi antar pihak. Proses ini juga terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya pemahaman tentang konsep *collaborative governance*. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pemahaman yang lebih baik, koordinasi yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang komprehensif.

Beberapa hambatan dalam implementasi *collaborative governance* di Kabupaten Grobogan termasuk kesulitan menyamakan persepsi tujuan dan manfaat kolaborasi, ego sektoral, kurangnya sosialisasi, dan tantangan dalam penyelarasan peraturan daerah dengan pendekatan kolaboratif. Pemahaman yang kurang tentang konsep ini, serta perbedaan prioritas antar pemangku kepentingan, menjadi penghalang utama. Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan pendekatan yang inklusif, pelatihan, dan pembaharuan regulasi untuk mendukung keberlanjutan proses kolaborasi.

3. Kepemimpinan Fasilitasi

Leadership facilitative mengacu pada model kepemimpinan yang

berfokus pada dialog dan kerjasama antar stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Hasil wawancara dengan Kabag Pariwisata menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilaksanakan memberikan dampak positif, seperti peningkatan koordinasi lintas sektor dan kualitas destinasi wisata. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada keterlibatan masyarakat lokal yang masih perlu ditingkatkan agar mereka merasakan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal. Pengembangan kapasitas masyarakat dan peningkatan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan menjadi kunci utama dalam keberlanjutan proses ini.

Terkait kebijakan yang ditetapkan, penerimaan terhadap kebijakan awal yang dirumuskan melalui pendekatan inklusif mendapat respon positif dari semua pihak. Kebijakan ini mengakomodasi berbagai kepentingan dan memberikan arahan yang jelas bagi kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tetap relevan dengan perkembangan dinamis sektor pariwisata. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkala diperlukan untuk menjaga kesesuaian dengan perubahan yang terjadi di lapangan, baik

itu perubahan tren wisata, kondisi ekonomi, maupun faktor eksternal lainnya.

Secara keseluruhan, penerapan *collaborative governance* di Kabupaten Grobogan dalam pengembangan pariwisata menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun masih membutuhkan perhatian terhadap partisipasi masyarakat lokal dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan (Wartina & Apriweni, 2018; Oktavianawati & Sri, 2018; Maharesti, 2018).

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Grobogan, beberapa faktor krusial ditemukan yang mendukung keberhasilan dan kelangsungan kolaborasi tersebut. Pertama, dialog tatap muka antara pemangku kepentingan berfungsi untuk mengatasi keraguan dan mencegah eksploitasi keuntungan pribadi, terutama di tahap awal yang sangat penting untuk membangun konsensus melalui musyawarah (Ansell & Gash, 2008). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertemuan rutin yang terstruktur dengan jelas, disertai transparansi informasi, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi. Hal ini

mencakup penetapan agenda yang jelas, fasilitasi diskusi yang setara, dan dokumentasi hasil rapat yang transparan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas forum kolaborasi juga penting untuk meningkatkan kualitas kerja sama.

Kepercayaan menjadi elemen penting dalam menjaga kelancaran kolaborasi. Menurut Pratama & Rofiaty (2018), kepercayaan membangun hubungan interpersonal yang sehat, dan dalam konteks ini, transparansi dan komitmen terhadap kesepakatan bersama memainkan peran vital dalam mencegah konflik. Pemangku kepentingan di Kabupaten Grobogan sangat menekankan pentingnya keputusan yang diambil secara musyawarah dan menghindari kepentingan sektoral demi kepentingan bersama. Ini selaras dengan temuan Nabila & Ratnawati (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah faktor kunci dalam membangun hubungan kerja yang efektif. Dengan membangun komunikasi rutin dan berfokus solusi win-win, konflik dapat dihindari, dan kolaborasi bisa lebih efektif.

Selain itu, komitmen para pemangku kepentingan terhadap tujuan bersama, yaitu kemajuan pariwisata

daerah, sangat menentukan keberhasilan kolaborasi. Setiap pemangku kepentingan harus menunjukkan kontribusi yang setara dan hadir aktif dalam setiap forum pertemuan. Ini menggarisbawahi bahwa komitmen yang konsisten adalah kunci agar kolaborasi tetap berkelanjutan dan berfokus pada kepentingan jangka panjang, bukan hanya kepentingan sektoral. Oleh karena itu, kesediaan untuk berkolaborasi, mendengarkan pihak lain, dan mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama menjadi hal yang tidak bisa ditawar (Kabag Pariwisata, Kabupaten Grobogan, 2024).

Pemahaman bersama juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi kelancaran kolaborasi. Dalam proses kolaborasi ini, setiap pihak, baik pemerintah, pelaku usaha pariwisata, maupun masyarakat lokal, perlu memiliki pemahaman yang sama tentang peran dan kontribusinya dalam pengembangan wisata. Diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), kunjungan lapangan bersama, serta pelatihan tentang governance yang kolaboratif menjadi sarana yang efektif untuk membangun pemahaman ini (Ansell & Gash, 2008). Dengan membangun pemahaman yang sama dan menggunakan teknologi

informasi untuk berbagi data, koordinasi dapat dilakukan dengan lebih efisien, mendukung tujuan pengembangan wisata yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Mewujudkan Kolaborasi

1. Anggaran

Pengelola Wisata Bledug Kuwu menghadapi kendala anggaran dalam pengembangan objek wisata. Untuk mengatasinya, mereka melakukan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk subsidi pemerintah, sponsor, dan donatur, serta meningkatkan efisiensi anggaran melalui evaluasi rutin. Selain itu, pengelola juga bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan lokal dan organisasi *non-profit*, serta mengadakan program *crowdfunding*.

Meskipun langkah-langkah ini efektif, ada risiko ketergantungan pada sumber eksternal yang tidak konsisten dan potensi pengorbanan kualitas fasilitas wisata akibat biaya rendah. Oleh karena itu, pengelola perlu strategi pengelolaan anggaran yang berkelanjutan dan terencana. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudiarta, et al (2021) yang menyarankan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemanfaatan dana

desa untuk pengembangan infrastruktur wisata

2. CSR (Corporate Social Responsibility)

Dinas Pariwisata Kabupaten Grobogan berencana mengintegrasikan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung pengembangan objek wisata dengan melibatkan perusahaan lokal dan organisasi non-profit. Program ini meliputi peningkatan keterampilan masyarakat, penghijauan, pelestarian lingkungan, serta mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat setempat.

Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari pihak terkait, serta hambatan dalam koordinasi dan alokasi sumber daya. Hal ini sejalan dengan analisis yang diungkapkan oleh Sholikhah, et al (2018) yang menyatakan pentingnya fokus pada tiga aspek utama dalam CSR: kemajuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kinerja perusahaan. Selain itu, kurangnya mekanisme evaluasi dan monitoring juga menjadi masalah besar dalam menilai dampak program CSR yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pariwisata untuk mengembangkan

mekanisme implementasi yang efektif dan terus memantau dampak keberlanjutan program CSR untuk memastikan hasil yang optimal dalam pengembangan wisata di Kabupaten Grobogan

3. Kurangnya Promosi

Promosi merupakan kegiatan komunikasi yang penting untuk mengenalkan produk dan menarik konsumen agar melakukan pembelian (Pratama & Rofiaty (2018)). Dalam konteks pariwisata, promosi bertujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada wisatawan lokal maupun internasional guna merangsang minat dan meningkatkan kunjungan.

Pengelola Wisata Bledug Kuwu Kabupaten Grobogan menyadari tantangan kurangnya media promosi sebagai hambatan dalam pengembangan objek wisata tersebut. Sebagai solusi, mereka telah memperbarui situs web dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan promosi. Mereka juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan agen perjalanan lokal serta terlibat dalam pameran pariwisata untuk meningkatkan visibilitas. Meskipun langkah-langkah tersebut positif,

efektivitasnya tetap bergantung pada jangkauan dan interaksi yang diperoleh, serta potensi persaingan dengan destinasi wisata lainnya yang serupa. Promosi bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar menerima, membeli, dan tetap setia pada produk yang ditawarkan.

4. Kurangnya Perhatian dari Pemerintah.

Perhatian, atau atensi, adalah fenomena psikologis yang melibatkan berbagai aktivitas mental dan otak manusia, yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald Broadbent dalam bukunya *Perception and Communication* pada tahun 1953. Broadbent mengemukakan bahwa atensi merupakan hasil dari keterbatasan kapasitas sistem pemrosesan informasi manusia yang hanya dapat memproses sebagian kecil dari stimulus yang ada (Solso, 2020). Dalam konteks pengembangan objek wisata, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap sektor pariwisata dapat menjadi hambatan yang signifikan, seperti yang diungkapkan oleh Pengelola Wisata Bledug Kuwu Kabupaten Grobogan. Kurangnya perhatian ini berdampak pada alokasi anggaran dan sumber daya yang terbatas, sehingga

menghambat pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata yang dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Sebagai respons terhadap hal ini,

Pengelola Wisata Bledug Kuwu telah melakukan langkah-langkah seperti advokasi kepada pemerintah, membangun hubungan dengan pihak terkait, dan menyampaikan manfaat pengembangan wisata untuk meningkatkan kesadaran akan potensi ekonomi lokal. Meskipun langkah-langkah ini positif, tantangannya terletak pada seberapa efektif upaya tersebut dalam memperoleh perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah untuk alokasi anggaran dan peraturan yang mendukung pengembangan wisata (Solso, 2020).

Kesimpulan

Kolaborasi *governance* dalam pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan koordinasi, pemahaman, dan partisipasi. Desain kelembagaan yang ada memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, koordinasi yang efektif, dan penyelarasan regulasi. Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi ini tercermin dalam peningkatan

koordinasi lintas sektor dan kebijakan partisipatif, meskipun keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Proses kolaborasi dilakukan melalui dialog rutin, transparansi, pemahaman bersama, dan komitmen kolektif untuk menciptakan sinergi berkelanjutan.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam mewujudkan kolaborasi pengembangan wisata Bledug Kuwu. Keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui diversifikasi pendanaan dan kerjasama eksternal, meskipun keberlanjutannya menjadi tantangan. Minimnya CSR dari pihak swasta dapat diatasi dengan mengintegrasikan CSR dalam kolaborasi multi-stakeholder. Selain itu, kekurangan media promosi ditanggulangi dengan meningkatkan promosi online dan bekerja sama dengan agen perjalanan. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap wisata menjadi hambatan signifikan, namun pengelola berupaya melalui advokasi dan membangun hubungan untuk mendapatkan dukungan lebih besar.

Saran

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Grobogan, memberikan masukan terkait kebutuhan lokal, serta menjaga daya tarik wisata. Pengelola wisata perlu meningkatkan

transparansi penggunaan dana, merencanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk manfaat masyarakat, dan mengembangkan strategi promosi wisata yang komprehensif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai platform digital.

Dinas Pariwisata perlu memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan pemantauan program secara rutin. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur wisata, membuat regulasi yang mendukung industri pariwisata, dan bekerja sama dengan pengusaha untuk menarik investasi. Seluruh elemen terlibat diharapkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

Daftar Pustaka

- Afiyanti, Y., & Rachmawati, I. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Keperawatan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anriani, A. 2021. *Collaborative Governance: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Bryson, J.M., Crosby, B.C., & Middleton Stone, M.M. 2015. Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647-663.
- Choi, J., & Robertson, P. J. 2018. Collaborative Governance: A New Approach to Managing Public Services. *International Journal of Public Administration*, 41(2), 123-134.
- Doberstein, C. 2016. Collaborative Governance: A New Framework for Public Sector Management. *Public Management Review*, 18(5), 678-703.
- Kristanto, V. 2018. Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Maharesti, S. 2018. The Impact of Collaborative Governance on Local Tourism Development. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 123-130.
- Ratnawati, I. & Nabila, H. A. 2020. Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Keterikatan Karyawan dan Perilaku Kerja Proaktif Sebagai Variabel Intervening (Studi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IV Semarang). *Diponegoro Journal of Management*, 9(4), 1-12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Oktavianawati, D., & Sri, T. 2018. Challenges in Implementing Collaborative Governance in Tourism. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 13(2), 89-98.
- Pratama, R., & Rofiaty, A. 2018. Trust as a Key Element in Collaborative Governance. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 23-34.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Solikhah, B., Wahyudin, A., Yulianto, A. and Pratiwi, Y.E., 2018. An exploration of accounting conservatism practise: Empirical evidence from developing

country. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(18), pp.119-126.

Administrasi dan Organisasi, 25(1), 45-60.

Solso, R. L. 2020. *Cognitive Psychology*. Penerbit Pearson

Sudarmo. 2018. *Collaborative Governance dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sudiarta, I, M, et al. (2021). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta. *Jurnal Manajemen dan Parowosata*. Vol. 8 No. 2

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, A. 2000. *Administrasi Publik: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Tjahjadi, B. 2018. *Ekonomi Pariwisata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wartina, W., & Apriweni, R. 2018. Evaluating Collaborative Governance in Tourism Development. *Jurnal Ilmu*